

INDUSTRI PENGOLAHAN

DAN

DAYA SAING INDONESIA

DALAM RANTAI NILAI GLOBAL

Menguatkan Manufaktur,
Meningkatkan Nilai Tambah,
Menembus Pasar Dunia



Oleh:



Rudy C Tarumingkeng



MANUFAKTUR
BERDAYA SAING



RANTAI NILAI
GLOBAL



NILAI TAMBAH
TINGGI



INVESTASI &
INOVASI



BERKELANJUTAN



DAYA SAING
NASIONAL

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

8 April 2026

INDUSTRI PENGOLAHAN DAN DAYA SAING INDONESIA DALAM RANTAI NILAI GLOBAL

Abstrak

Makalah ini membahas posisi industri pengolahan Indonesia dalam upaya memperkuat daya saing nasional di dalam rantai nilai global. Argumen utama makalah ini adalah bahwa industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung penting bagi transformasi struktural ekonomi Indonesia, tetapi daya saingnya masih menghadapi kendala mendasar: produktivitas yang belum cukup tinggi, kompleksitas ekspor yang masih terbatas, ketergantungan pada komoditas dan produk antara, hambatan non-tarif terhadap input, serta integrasi yang belum kuat pada jaringan produksi manufaktur lintas negara. Data mutakhir menunjukkan bahwa industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia dengan porsi sekitar 19,07 persen pada 2025, dan pada triwulan III-2025 tumbuh 5,54 persen. Di sisi lain, ekspor industri pengolahan Januari–September 2025 mencapai US\$167,85 miliar, naik 17,02 persen, yang menandakan adanya momentum penguatan manufaktur. Namun, laporan World Bank menunjukkan bahwa pangsa ekspor manufaktur global Indonesia stagnan di sekitar 1,1 persen sejak 2000, sementara partisipasi backward GVC justru menurun. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan

strategi industri yang tidak berhenti pada hilirisasi dasar, tetapi bergerak menuju peningkatan teknologi, efisiensi layanan penunjang, reformasi regulasi, logistik yang lebih kompetitif, penguatan SDM, dan perluasan ekspor produk berkompleksitas lebih tinggi. Dengan demikian, industri pengolahan dapat menjadi kendaraan utama untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak global. ([BPS Web API](#))

Kata kunci: industri pengolahan, daya saing, rantai nilai global, global value chains, produktivitas, hilirisasi, ekspor manufaktur, transformasi struktural

Industri Pengolahan dan Daya Saing Indonesia dalam Rantai Nilai Global

Pendahuluan

Dalam sejarah pembangunan ekonomi modern, hampir tidak ada negara yang berhasil naik kelas menuju status berpendapatan tinggi tanpa memperkuat industri pengolahannya. Industri pengolahan penting bukan hanya karena menghasilkan barang, tetapi karena sektor ini biasanya menciptakan keterkaitan yang luas dengan pertanian, pertambangan, jasa logistik, keuangan, teknologi, riset, dan pendidikan vokasi. Di dalam industri pengolahan, pembelajaran teknologi berlangsung lebih cepat, produktivitas cenderung meningkat melalui skala dan standardisasi, serta peluang penciptaan pekerjaan formal dan bernilai tambah relatif lebih besar. Bagi Indonesia, pertanyaan tentang masa depan industri pengolahan menjadi semakin mendesak karena negara ini sedang berusaha keluar dari jebakan pendapatan menengah sambil menghadapi kompetisi yang makin ketat dari negara-negara tetangga di Asia.

Data ekonomi mutakhir menunjukkan bahwa industri pengolahan masih memegang posisi yang sangat penting dalam struktur ekonomi nasional. Pada 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap ekonomi nasional sebesar 56,93 persen, dan industri pengolahan tetap menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar, yakni sekitar 19,07 persen dari PDB. Pada triwulan III-2025, sektor industri pengolahan tumbuh 5,54 persen, ditopang terutama oleh industri makanan dan minuman, industri logam dasar, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Fakta ini menegaskan bahwa ketika orang berbicara tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, mereka sesungguhnya masih berbicara tentang pentingnya basis manufaktur nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, pentingnya industri pengolahan tidak otomatis identik dengan kuatnya daya saing Indonesia dalam rantai nilai global. World Bank mencatat bahwa pangsa ekspor manufaktur global Indonesia stagnan pada 1,1 persen sejak 2000, jauh tertinggal dari Vietnam yang naik dari 0,2 persen menjadi 1,6 persen pada 2020. Laporan yang sama menegaskan bahwa komposisi ekspor manufaktur Indonesia selama dua dekade terakhir relatif statis, sementara partisipasi Indonesia dalam global value chains (GVC) bersifat tidak merata: kuat pada sisi forward participation di komoditas, tetapi lemah pada backward participation dalam manufaktur. Artinya, Indonesia relatif kuat sebagai pemasok input awal, tetapi belum cukup dalam tertanam di jaringan produksi manufaktur lintas negara yang padat teknologi, desain, komponen, dan standardisasi.

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa daya saing industri pengolahan Indonesia di dalam rantai nilai global harus dipahami secara lebih luas daripada sekadar naiknya ekspor atau bertambahnya pabrik. Daya saing sesungguhnya menyangkut kemampuan menempati posisi strategis di dalam mata rantai produksi global: bukan sekadar mengekspor lebih banyak, tetapi mengekspor barang yang lebih kompleks; bukan sekadar menarik investasi, tetapi menyerap teknologi dan memperluas jaringan

pemasok domestik; bukan sekadar memperbesar output, tetapi meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan ketahanan ekonomi nasional. Dengan pendekatan seperti itu, pembahasan mengenai industri pengolahan menjadi relevan bukan hanya untuk ekonomi, melainkan juga untuk agenda pembangunan jangka panjang Indonesia.

1. Kerangka Konseptual: Industri Pengolahan, Daya Saing, dan Rantai Nilai Global

Rantai nilai global pada dasarnya menggambarkan cara produksi modern dipecah ke dalam banyak tahap yang tersebar lintas negara. Satu produk akhir dapat dirancang di satu negara, komponen utamanya diproduksi di negara lain, dirakit di negara ketiga, lalu dipasarkan secara global oleh perusahaan yang beroperasi dalam ekosistem layanan digital, logistik, sertifikasi, dan keuangan internasional. Dalam sistem seperti ini, daya saing negara tidak ditentukan semata oleh ketersediaan bahan baku atau murahness tenaga kerja, tetapi oleh kemampuannya memasuki simpul-simpul strategis yang lebih bernilai: desain, komponen, standardisasi, engineering, quality control, branding, dan layanan purna jual. World Bank menekankan bahwa lemahnya backward GVC participation berarti Indonesia belum cukup kuat terhubung ke jaringan produksi internasional yang membutuhkan impor input, komponen, dan pengetahuan untuk kemudian diolah kembali menjadi barang ekspor bernilai lebih tinggi.

Dalam konteks itu, daya saing industri pengolahan seharusnya dipahami secara multidimensi. Ada dimensi biaya, yakni kemampuan menghasilkan output dengan efisien. Ada dimensi mutu, yakni kemampuan memenuhi standar teknis dan konsistensi kualitas. Ada dimensi kecepatan, terutama dalam hal logistik, perizinan, dan respons terhadap perubahan permintaan. Ada dimensi inovasi, yakni kapasitas untuk naik dari produk sederhana ke produk dengan kandungan teknologi lebih tinggi. Dan ada dimensi kelembagaan, berupa kepastian kebijakan, persaingan usaha yang sehat, dan hubungan antara industri, negara, serta lembaga pendidikan. Laporan

World Bank dan OECD pada dasarnya sejalan dalam menekankan bahwa kelemahan produktivitas Indonesia bukan semata persoalan pabrik, tetapi juga dipengaruhi kualitas regulasi, kompetisi, akses input, dan efisiensi jasa pendukung.

Bappenas memberikan sudut pandang yang sangat penting untuk konteks Indonesia. Dalam publikasi perkembangan ekonomi 2025, Bappenas menegaskan bahwa daya saing suatu produk tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh posisi strategisnya di dalam global value chain. Implikasi dari pandangan ini sangat besar. Jika suatu produk masih berada di bagian hulu dengan kompleksitas rendah, maka produk tersebut lebih mudah digeser oleh pemasok lain. Sebaliknya, jika suatu negara mampu masuk ke komponen manufaktur berteknologi lebih tinggi, barangnya menjadi lebih sulit disubstitusi, margin keuntungannya cenderung lebih baik, dan posisi tawarnya meningkat. Dengan kata lain, strategi industri Indonesia tidak cukup hanya memperbesar volume ekspor; ia harus memperbaiki lokasi Indonesia di dalam rantai nilai global.

Kerangka ini juga membantu menjelaskan mengapa hilirisasi saja tidak cukup bila dipahami terlalu sempit. Hilirisasi dasar—misalnya memproses bahan mentah menjadi produk antara—memang dapat meningkatkan nilai tambah domestik. Akan tetapi, bila proses itu tidak berlanjut ke penguasaan teknologi, rekayasa proses, sertifikasi global, dan produksi komponen bernilai tinggi, maka negara hanya berpindah dari penjual bahan mentah menjadi penjual barang setengah jadi. Secara ekonomi, itu kemajuan; tetapi secara strategis, itu belum tentu cukup untuk menciptakan lompatan daya saing. Karena itu, pembahasan industri pengolahan Indonesia dalam GVC harus dibawa melampaui perdebatan ekspor bahan mentah versus smelter, menuju pembahasan tentang kompleksitas, pembelajaran industri, dan upgrading. ([Perpustakaan Bappenas](#))

2. Potret Terkini Industri Pengolahan Indonesia

Secara makro, posisi industri pengolahan Indonesia pada 2025 menunjukkan dua pesan yang berjalan bersamaan. Pertama, sektor ini masih sangat besar dan relevan. Kedua, ukurannya yang besar belum otomatis berarti daya saing globalnya telah optimal. BPS mencatat bahwa pada 2025 ekonomi Indonesia mencapai Rp23.821,1 triliun dengan PDB per kapita Rp83,7 juta atau sekitar USD5.083,4. Ekspor barang dan jasa menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 7,03 persen. Dalam konteks ini, industri pengolahan berfungsi sebagai salah satu jembatan utama antara dinamika permintaan domestik dan ekspor. Ia menjadi sektor yang tidak hanya menyerap permintaan dalam negeri, tetapi juga menghubungkan Indonesia dengan pasar dunia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kinerja triwulanan mengonfirmasi peran tersebut. Pada triwulan III-2025, industri pengolahan tumbuh 5,54 persen. Menurut BPS, pertumbuhan ini khususnya ditopang oleh industri makanan dan minuman, industri logam dasar, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Pola ini menarik karena memperlihatkan tiga sumber kekuatan manufaktur Indonesia. Pertama, manufaktur berbasis pasar domestik besar seperti makanan dan minuman. Kedua, manufaktur berbasis sumber daya dan hilirisasi seperti logam dasar. Ketiga, manufaktur yang menuntut kemampuan proses dan standardisasi lebih tinggi seperti kimia dan farmasi. Ketiga jalur ini memperlihatkan bahwa struktur industri Indonesia sedang bergerak dalam beberapa arah sekaligus, meski belum semuanya mencapai tingkat kompleksitas yang sama. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi perdagangan, sinyal penguatan industri pengolahan juga terlihat jelas. BPS melaporkan bahwa pada periode Januari–April 2025, nilai ekspor Indonesia meningkat 6,65 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan kenaikan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan dengan nilai ekspor US\$68,84 miliar atau naik 16,08 persen. Pada periode Januari–September 2025, ekspor Indonesia naik 8,14 persen, dan lagi-lagi pendorong utamanya adalah industri pengolahan yang

mencatat nilai ekspor US\$167,85 miliar atau naik 17,02 persen. Data ini menunjukkan bahwa ketika manufaktur Indonesia bergerak, ia langsung tercermin dalam performa ekspor nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam arti tertentu, data 2025 memperlihatkan bahwa cerita mengenai “deindustrialisasi total” di Indonesia adalah penyederhanaan yang kurang tepat. Industri pengolahan belum lenyap; ia justru masih menjadi kontributor utama terhadap PDB dan penggerak penting ekspor. Akan tetapi, besar secara agregat tidak sama dengan unggul secara strategis. Sebuah sektor bisa besar karena pasar domestik yang luas atau karena basis komoditas yang kuat, tetapi tetap lemah dalam hal produktivitas, kompleksitas produk, dan keterhubungan dengan GVC manufaktur yang lebih canggih. Di sinilah pertanyaan utama makalah ini menjadi penting: bagaimana menjembatani kesenjangan antara “besar” dan “berdaya saing tinggi”? ([BPS Web API](#))

Masuknya investasi juga memperlihatkan adanya momentum industrialisasi, terutama pada kegiatan hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi bidang hilirisasi sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen secara tahunan, dengan kontribusi sekitar 30,2 persen terhadap total investasi. Angka ini menunjukkan bahwa industri pengolahan—khususnya yang terkait pengolahan sumber daya alam—masih sangat menarik bagi investor. Namun sekali lagi, investasi besar perlu dibaca secara hati-hati. Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, melainkan seberapa jauh investasi itu membangun kapasitas nasional, mengaitkan pemasok domestik, memperkuat SDM, dan mendorong pergeseran ke produk yang lebih kompleks. ([BKPM](#))

3. Posisi Indonesia dalam Rantai Nilai Global

Untuk menilai daya saing Indonesia di dalam rantai nilai global, kita perlu bergerak dari statistik output ke statistik posisi. World Bank dalam

Indonesia Growth and Jobs Report memberikan gambaran yang cukup tegas: pangsa ekspor manufaktur global Indonesia stagnan di 1,1 persen sejak 2000, sementara negara seperti Vietnam memperlihatkan kenaikan tajam dari 0,2 persen menjadi 1,6 persen pada 2020. Selain itu, ekspor Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada komoditas seperti kelapa sawit, batubara, emas, gas, karet, dan tembaga, yang pada 2020 menyumbang hampir sepertiga ekspor barang total. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memang aktif dalam perdagangan global, tetapi struktur keaktifannya masih sangat dipengaruhi sumber daya primer.

Lebih jauh, World Bank mencatat bahwa komposisi ekspor manufaktur Indonesia selama dua dekade terakhir cenderung statis. Ada sedikit kenaikan pada transport equipment, chemicals, footwear, dan food products, tetapi segmen seperti machinery, electronics, textiles, dan wood products justru mengalami penurunan. Bandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang lebih berhasil melakukan diversifikasi ke industri bernilai tambah lebih tinggi. Bahkan dari sisi *economic complexity*, skor Malaysia pada 2020 tercatat 1,0, sementara Indonesia berada di -0,3. Angka ini penting bukan sekadar sebagai statistik, melainkan sebagai cermin bahwa Indonesia masih belum cukup kuat mengeksport barang yang membutuhkan kombinasi kapabilitas industri yang lebih rumit.

Masalahnya menjadi lebih jelas ketika melihat indikator partisipasi GVC. Laporan World Bank menyatakan bahwa integrasi Indonesia ke GVC bersifat tidak seimbang: tinggi pada *forward participation* di komoditas, tetapi rendah pada *backward participation* dalam manufaktur. Partisipasi backward—yang penting untuk terhubung ke jaringan produksi internasional—turun dari 19 persen pada 2005 menjadi 12,9 persen pada 2015. Sebagai perbandingan, Malaysia berada pada 33 persen dan Vietnam 47 persen pada 2015. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia relatif lebih sering memasok input ke negara lain daripada menjadi bagian yang dalam dari jejaring manufaktur lintas negara yang mengandalkan komponen, mesin, dan intermediate goods dari banyak yurisdiksi.

Secara analitis, posisi seperti ini membawa konsekuensi strategis. *Forward participation* yang tinggi bisa berarti Indonesia kuat sebagai pemasok komoditas atau input awal, tetapi nilai tambah tertinggi sering berada di tahap yang lebih dekat ke produk akhir, desain, distribusi, dan merek. Sementara itu, *backward participation* yang rendah dapat mencerminkan belum memadainya kemampuan industri nasional untuk mengimpor input berkualitas, mengolahnya secara efisien, lalu mengekspornya kembali sebagai bagian dari jaringan produksi global. Dengan kata lain, Indonesia masih cukup dominan pada "rantai awal" tetapi belum cukup dalam pada "rantai rapat" manufaktur modern. Itu sebabnya ukuran keberhasilan industri pengolahan tidak bisa dibatasi pada ekspor bruto; yang harus dilihat adalah posisi di dalam jaringan produksi.

Bappenas memberi penegasan tambahan atas persoalan ini. Dalam evaluasi 2025, Bappenas menyebut bahwa kompleksitas produk Indonesia dalam rantai nilai global masih terbatas. Bappenas juga menekankan bahwa produk yang berada di bagian hulu dan berkompleksitas rendah lebih mudah tergeser oleh pemasok lain, sedangkan pengembangan hilirisasi ke depan harus diarahkan pada komponen manufaktur berteknologi lebih tinggi yang lebih sulit digantikan. Ini adalah diagnosis yang sangat penting: tantangan Indonesia bukan hanya memperluas skala industri pengolahan, tetapi menaikkan derajat kesulitan, diferensiasi, dan ketergantungan pasar dunia pada kemampuan Indonesia. ([Perpustakaan Bappenas](#))

4. Hambatan Struktural Daya Saing Industri Pengolahan

Salah satu hambatan paling mendasar adalah turunnya peran manufaktur dalam struktur ekonomi relatif terhadap potensi yang dimiliki Indonesia. ADB mencatat bahwa *manufacturing value added* sebagai persentase PDB turun dari 32,0 persen pada 2002 menjadi 19,0 persen pada 2023. Penurunan ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia mengalami tekanan deindustrialisasi relatif sebelum benar-benar mencapai basis

industri berteknologi tinggi yang kuat. Secara sederhana, porsi manufaktur menurun, tetapi kenaikan kualitas dan kompleksitas industrinya belum cukup cepat untuk menutup kehilangan itu. Karena itu, tantangan Indonesia bukan sekadar “menghidupkan kembali” manufaktur, melainkan membangun manufaktur yang lebih produktif, lebih canggih, dan lebih terkoneksi secara global. ([Asian Development Bank](#))

Hambatan berikutnya adalah produktivitas. World Bank dalam laporan 2026 menegaskan bahwa pertumbuhan Indonesia pada tahap berikutnya membutuhkan reformasi yang lebih kuat pada kebijakan yang memungkinkan bisnis berkembang. Laporan itu secara eksplisit menyatakan bahwa lingkungan regulasi bisnis yang lebih dapat diprediksi, kompetisi yang lebih baik, serta proses masuk dan keluar perusahaan yang lebih lancar dapat membuka pertumbuhan di manufaktur dan jasa bernilai tinggi. Pesan ini sangat penting. Dalam banyak kasus, masalah manufaktur bukan terletak pada kurangnya minat investor semata, melainkan pada mahalnya ketidakpastian. Ketika aturan sering berubah, perizinan membingungkan, atau persaingan tidak sehat, perusahaan cenderung enggan melakukan investasi jangka panjang pada upgrading teknologi.

Hambatan lain yang kerap kurang diperhatikan adalah mutu jasa pendukung manufaktur. World Bank menegaskan bahwa hambatan pada sektor jasa juga dapat menekan output manufaktur, dan bahwa menurunnya daya saing manufaktur Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya layanan input, tetapi juga oleh berbagai penghalang perdagangan yang memengaruhi input manufaktur secara langsung. Ini berarti pabrik tidak dapat dinilai terpisah dari pelabuhan, logistik, distribusi, sertifikasi, jasa teknik, sistem pembayaran, dan infrastruktur digital. Di era GVC, manufaktur yang hebat hampir selalu berdiri di atas jasa yang efisien. Bila logistik lambat, jasa kepelabuhanan mahal, atau regulasi impor input berbelit, maka industri pengolahan akan kalah bahkan sebelum produk selesai dibuat.

Data World Bank memperlihatkan secara konkret mengapa kebijakan input menjadi krusial. Laporan tersebut menyebut bahwa barang antara impor menyumbang lebih dari 10 persen biaya manufaktur dan sekitar 20 persen biaya input antara. Pada saat yang sama, *non-tariff measures* telah melonjak dan kini memengaruhi 90 persen barang konsumsi impor serta porsi besar barang antara dan barang modal. Ini adalah masalah nyata bagi industri pengolahan. Sebuah perusahaan yang ingin masuk ke jaringan produksi global biasanya harus mengakses komponen, mesin, bahan kimia, atau peralatan tertentu yang belum diproduksi secara efisien di dalam negeri. Bila akses itu mahal atau tidak pasti, maka industri nasional justru kesulitan naik kelas.

OECD menambahkan peringatan penting terhadap strategi industrialisasi yang terlalu sempit atau terlalu luas sekaligus. Menurut OECD, tujuan kebijakan industri—termasuk dukungan bagi *downstreaming*—perlu didefinisikan secara sempit namun masuk akal. OECD juga memperingatkan adanya risiko ketika pemerintah menargetkan pangsa tertentu tenaga kerja di manufaktur atau pengolahan, karena hal itu dapat mendorong penggunaan teknik produksi berproduktivitas rendah demi mengejar serapan kerja. Selain itu, OECD menyebut bahwa insentif fiskal untuk ekstraksi dan pemrosesan rata-rata mencapai sekitar 0,4 persen PDB antara 2016 dan 2022, dan ada risiko kelebihan kapasitas serta salah alokasi sumber daya. Artinya, industrial policy diperlukan, tetapi harus dirancang dengan disiplin evaluasi yang kuat. ([OECD](#))

Bappenas juga menyoroti masalah standar global. Dalam publikasi 2025, Bappenas menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi standar global yang kian ketat. Ini sangat relevan dalam konteks pasar dunia yang makin sensitif terhadap traceability, sustainability, carbon footprint, food safety, dan ketepatan kualitas. Sebuah industri pengolahan dapat bertumbuh cepat di pasar domestik, tetapi bila tidak memenuhi standar global, ia akan kesulitan naik ke posisi yang lebih baik di GVC.

Dengan demikian, daya saing bukan hanya persoalan kuantitas produksi, melainkan juga persoalan kredibilitas teknis dan kepatuhan standar.

5. Peluang Strategis bagi Indonesia

Meski hambatannya besar, peluang Indonesia juga sangat nyata. Pertama, Indonesia memiliki kombinasi langka antara pasar domestik yang besar, basis sumber daya alam yang luas, dan posisi geopolitik yang penting di Asia Tenggara. Tidak banyak negara yang memiliki ketiga modal ini secara bersamaan. Basis domestik yang besar memberi ruang bagi pembentukan skala produksi; sumber daya alam memberi bahan baku bagi industrialisasi; dan lokasi strategis membuka peluang integrasi ke rantai pasok regional maupun global. Inilah alasan mengapa Indonesia tetap menarik bagi investor, termasuk di bidang hilirisasi dan manufaktur berbasis sumber daya. Realisasi investasi hilirisasi yang mencapai Rp584,1 triliun pada 2025 memperlihatkan bahwa pasar percaya terhadap potensi transformasi industri Indonesia. ([BKPM](#))

Kedua, beberapa subsektor industri pengolahan Indonesia telah menunjukkan titik masuk yang menjanjikan. Industri makanan dan minuman tetap kuat karena didukung pasar domestik dan peluang ekspor regional. Industri logam dasar berkembang melalui hilirisasi mineral dan kenaikan permintaan global terhadap material industri. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional memperlihatkan peran yang semakin penting dalam menopang pertumbuhan. Ketika tiga subsektor ini tumbuh bersamaan, Indonesia sebenarnya sedang membangun tiga jalur upgrading yang berbeda: consumer manufacturing, resource-based manufacturing, dan process-intensive manufacturing. Tantangannya adalah memastikan bahwa ketiganya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan melalui kebijakan industri yang konsisten. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketiga, Bappenas dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan “Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam

Negeri” sebagai salah satu prioritas nasional, termasuk pengembangan industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor. Prioritas ini penting karena memberi arah bahwa agenda industri Indonesia tidak boleh berhenti pada pengolahan sederhana. Industri pengolahan harus diposisikan sebagai wahana naik kelas: dari bahan mentah ke material, dari material ke komponen, dari komponen ke sistem, dan dari sistem ke produk akhir yang lebih kompleks. Dalam bahasa strategi, ini berarti Indonesia perlu bergerak dari *resource advantage* menuju *capability advantage*. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Keempat, peluang besar Indonesia justru terletak pada kemampuan menggabungkan manufaktur dengan jasa modern. Sebuah industri pengolahan yang kompetitif hari ini tidak cukup hanya punya mesin; ia harus terhubung dengan desain digital, manajemen rantai pasok, jasa sertifikasi, software industri, predictive maintenance, pemasaran global, dan pembiayaan perdagangan. Dengan kata lain, masa depan daya saing manufaktur Indonesia bukan sekadar lebih banyak pabrik, melainkan pabrik yang ditopang ekosistem jasa yang lebih unggul. World Bank menegaskan bahwa pertumbuhan manufaktur bernilai tinggi sangat terkait dengan reformasi layanan penunjang dan kebijakan bisnis yang lebih sehat.

Kelima, peluang upgrading Indonesia akan semakin besar bila transformasi industri dikaitkan dengan transisi hijau. Pasar global bergerak menuju produk yang lebih rendah emisi, lebih dapat ditelusuri, dan lebih sesuai standar keberlanjutan. Jika Indonesia hanya masuk ke rantai nilai global melalui keunggulan biaya jangka pendek, maka posisinya mudah tergeser. Tetapi jika Indonesia mampu memadukan pengolahan domestik, sertifikasi, energi yang lebih bersih, dan kualitas proses produksi yang kredibel, maka posisi industrinya akan lebih kuat. Di titik ini, green manufacturing bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi daya saing jangka panjang.

6. Arah Kebijakan: Dari Industri Besar ke Industri Berdaya Saing Tinggi

Arah kebijakan pertama adalah memindahkan fokus dari sekadar pembesaran skala ke pendalaman kapabilitas. Indonesia tidak cukup hanya menghitung jumlah smelter, pabrik, atau nilai investasi; yang lebih penting ialah seberapa banyak produk berkompleksitas tinggi yang dapat dihasilkan, seberapa besar kandungan engineering lokal, dan seberapa dalam jaringan pemasok domestik terbentuk. Karena itu, target industri sebaiknya tidak disusun hanya dalam bahasa volume, tetapi juga dalam bahasa teknologi, sertifikasi, desain produk, dan perluasan pasar. Bappenas sendiri mengisyaratkan bahwa masa depan daya saing berada pada pendalaman hilirisasi menuju komponen manufaktur berteknologi lebih tinggi yang lebih sulit digantikan.

Arah kedua ialah memperbaiki kualitas regulasi bisnis dan kompetisi. World Bank menegaskan perlunya lingkungan regulasi yang dapat diprediksi, persaingan yang lebih baik, dan mekanisme masuk-keluar perusahaan yang lebih efisien. Ini berarti reformasi industri tidak bisa berdiri sendiri; ia memerlukan reformasi kelembagaan. Daya saing tidak tumbuh di tengah ketidakpastian kebijakan, proteksi yang membingungkan, dan dominasi pelaku tertentu yang menutup ruang bagi inovasi. Manufaktur yang sehat justru membutuhkan disiplin pasar yang sehat: pemain baru bisa masuk, pemain tidak efisien bisa keluar, dan perusahaan memiliki insentif untuk terus memperbaiki teknologi serta produktivitas.

Arah ketiga adalah menata ulang kebijakan input. Temuan World Bank bahwa imported intermediate goods menyumbang lebih dari 10 persen biaya manufaktur dan 20 persen biaya input antara harus dibaca sebagai peringatan. Dalam banyak sektor, akses pada input impor bukan ancaman bagi industrialisasi, melainkan syarat untuk masuk ke GVC. Karena itu, kebijakan industri yang baik bukanlah kebijakan yang membatasi semua impor, melainkan kebijakan yang cerdas dalam membedakan antara impor konsumtif dan impor produktif. Jika bahan baku, komponen, mesin, atau

modal kerja penting dibuat sulit masuk, maka industri pengolahan nasional justru akan kehilangan kemampuan bersaing di pasar internasional.

Arah keempat adalah memperkuat logistik dan jasa pendukung manufaktur. Sebuah perusahaan ekspor tidak hanya membutuhkan ongkos produksi yang efisien, tetapi juga kepastian pengiriman, dokumentasi yang cepat, jasa kepabeanan yang responsif, pergudangan modern, akses pembiayaan, dan infrastruktur digital yang stabil. Karena itu, agenda peningkatan daya saing manufaktur harus dipadukan dengan reformasi sektor jasa. Ini juga sebabnya negara-negara yang berhasil masuk lebih dalam ke GVC biasanya tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga membangun pelabuhan, pusat logistik, pusat sertifikasi, politeknik, laboratorium pengujian, dan sistem data perdagangan yang andal.

Arah kelima adalah memprioritaskan upgrading produk. Misalnya, dalam industri logam dan mineral, kebijakan harus mendorong perpindahan dari produk antara ke material canggih, komponen, dan sistem manufaktur yang lebih bernilai. Dalam industri agro, Indonesia perlu bergerak dari ekspor komoditas mentah dan olahan sederhana menuju specialty ingredients, functional foods, oleokimia khusus, biomaterial, dan produk berbasis inovasi. Dalam industri kimia dan farmasi, fokus perlu diarahkan pada penguatan bahan baku strategis, formulasi, standardisasi, dan koneksi dengan riset kesehatan. Dengan begitu, industri pengolahan Indonesia tidak hanya tumbuh secara horizontal, tetapi juga naik secara vertikal dalam rantai nilai. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Arah keenam adalah membangun hubungan yang lebih erat antara industri, pendidikan, dan riset. Daya saing manufaktur jangka panjang tidak dapat dipertahankan hanya dengan keunggulan biaya tenaga kerja. Ia menuntut teknisi yang baik, supervisor produksi yang paham lean manufacturing, insinyur proses, analis mutu, ahli maintenance, dan peneliti yang mampu memecahkan masalah di rantai produksi. Di sinilah peran universitas, politeknik, dan lembaga litbang menjadi menentukan. Jika

industri pengolahan Indonesia ingin naik dalam GVC, maka pembelajaran industri harus terjadi di dalam negeri, bukan terus-menerus diimpor dari luar. World Bank menegaskan bahwa pengetahuan, teknologi, dan pemain baru perlu ditarik masuk untuk menaikkan produktivitas dan menciptakan pekerjaan yang lebih baik.

Arah ketujuh adalah mengembangkan industrial policy yang disiplin, terukur, dan terbuka pada evaluasi. OECD mengingatkan bahwa kebijakan industri yang terlalu luas dapat berakhir pada salah alokasi sumber daya, kelebihan kapasitas, dan teknik produksi berproduktivitas rendah.

Peringatan ini sangat penting bagi Indonesia agar tidak jatuh ke jebakan "industri atas nama industri". Bantuan fiskal, insentif, perlindungan, dan fasilitas seharusnya diberikan dengan syarat yang jelas: ada target upgrading, ada evaluasi berkala, ada batas waktu, dan ada indikator produktivitas. Dengan disiplin seperti ini, kebijakan industri menjadi alat transformasi, bukan sekadar instrumen distribusi rente. (OECD)

Arah kedelapan adalah menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi ekspor. Bappenas telah mengingatkan bahwa standar global makin ketat, sedangkan World Bank menunjukkan bahwa struktur ekspor Indonesia masih belum cukup kompleks. Kedua kenyataan ini berarti bahwa daya saing masa depan akan ditentukan bukan hanya oleh harga, tetapi juga oleh compliance, sustainability, traceability, dan kemampuan memenuhi regulasi pasar tujuan. Dalam konteks ini, industri pengolahan Indonesia harus disiapkan untuk menghadapi dunia dagang yang lebih "berstandar", lebih "hijau", dan lebih "berjejak data". Bila gagal, Indonesia akan terus tertahan di pasar yang sensitif pada harga. Bila berhasil, Indonesia bisa masuk ke segmen dengan margin lebih baik dan hubungan dagang lebih tahan lama.

Penutup

Industri pengolahan Indonesia masih merupakan pilar utama ekonomi nasional. Pada 2025, kontribusinya terhadap PDB tetap paling besar,

pertumbuhannya solid, dan ekspornya meningkat kuat. Dalam arti kuantitatif, ini menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia belum kehilangan relevansinya. Bahkan, arus investasi hilirisasi yang besar memperlihatkan bahwa Indonesia masih dipandang memiliki potensi industrialisasi yang signifikan. Namun, makalah ini menunjukkan bahwa besarnya industri pengolahan tidak boleh menutupi persoalan struktural yang masih ada: kompleksitas ekspor yang terbatas, stagnasi pangsa ekspor manufaktur global, penurunan backward GVC participation, hambatan input, dan kelemahan produktivitas. ([BPS Web API](#))

Karena itu, pertanyaan kuncinya bukan apakah Indonesia memerlukan industri pengolahan—jelas memerlukan—melainkan industri pengolahan seperti apa yang harus dibangun. Jawaban yang muncul dari berbagai data dan analisis cukup jelas: Indonesia membutuhkan industri pengolahan yang lebih kompleks, lebih produktif, lebih terhubung dengan jasa modern, lebih terbuka pada teknologi, lebih disiplin dalam kebijakan industrinya, dan lebih kuat posisinya dalam rantai nilai global. Jika agenda ini dijalankan secara konsisten, industri pengolahan dapat menjadi mesin transformasi yang membawa Indonesia dari ekonomi besar menjadi ekonomi yang benar-benar berdaya saing. Tetapi bila tidak, Indonesia berisiko tetap besar di angka, namun belum cukup kuat di posisi strategis.

Glosarium

Glosarium berikut disusun secara sintesis dari penggunaan istilah dalam publikasi Bappenas, World Bank, OECD, dan dokumen kebijakan pembangunan Indonesia.

Industri pengolahan: sektor yang mengubah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai tambah lebih tinggi.

Daya saing: kemampuan suatu sektor, perusahaan, atau negara untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam harga, mutu, kecepatan, inovasi, dan standar di pasar domestik maupun global.

Rantai nilai global (Global Value Chain/GVC): jaringan lintas negara tempat proses produksi suatu barang dipecah ke banyak tahap, dari desain, bahan baku, komponen, perakitan, hingga distribusi.

Forward participation: keterlibatan suatu negara dalam GVC melalui penyediaan input atau bahan antara yang kemudian diproses lebih lanjut di negara lain.

Backward participation: keterlibatan suatu negara dalam GVC melalui penggunaan input impor untuk menghasilkan produk ekspor.

Nilai tambah: selisih antara nilai output dengan nilai input yang digunakan dalam proses produksi.

Kompleksitas ekonomi: ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu negara mampu memproduksi dan mengekspor barang yang membutuhkan kombinasi kapabilitas yang beragam dan canggih.

Hilirisasi: proses pengembangan industri ke arah pengolahan lanjutan agar sumber daya domestik menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Barang antara (intermediate goods): bahan atau komponen yang digunakan sebagai input dalam proses produksi barang lain.

Non-tariff measures (NTMs): kebijakan non-tarif seperti inspeksi pra-pengapalan, pembatasan pelabuhan masuk, persetujuan impor, dan regulasi teknis yang memengaruhi perdagangan.

Upgrading: proses naik kelas dalam rantai nilai, baik melalui peningkatan kualitas produk, proses produksi, fungsi bisnis, maupun perpindahan ke segmen bernilai tambah lebih tinggi.

Transformasi struktural: perubahan komposisi perekonomian dari kegiatan berproduktivitas rendah ke kegiatan berproduktivitas lebih tinggi, terutama manufaktur dan jasa modern.

Referensi (APA 7)

Asian Development Bank. (2024). *Indonesia: Country partnership strategy (2025–2029)*. ADB.

Badan Pusat Statistik. (2025, June 2). *Neraca perdagangan tetap surplus*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025, November 3). *Siaran pers Badan Pusat Statistik*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). *Siaran pers Badan Pusat Statistik*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, January 15). *Realisasi investasi 2025 lampau target, hilirisasi melompat 43,3 persen*. BKPM.

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia triwulan II 2025*. Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029*. Bappenas.

OECD. (2024). *OECD economic surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing.

World Bank. (2026). *Running faster, for longer: Structural transformation, productivity, and good jobs: Indonesia Growth and Jobs Report*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 8 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d5da1b-8de0-8398-839b-3a205c2d1f95>